

DAMPAK PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL SKEMA KEMITRAAN KEHUTANAN TERHADAP KELESTARIAN HUTAN DAN PENDAPATAN PETANI HUTAN

Impact of Social Forestry Program Forest Partnership Scheme on Forest Sustainability and Forest Farmer Income

Jumanto^{1)*}, D.S. Martono¹

¹Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun

DOI: <http://dx.doi.org/10.21111/agrotech.v6i3.4908>

Terima 15 September 2020

Revisi 30 September 2020

Terbit 31 Desember 2020

Abstrak: Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, hutan lestari, dan terjaganya ketahanan pangan di Indonesia adalah terbitnya Peraturan Menteri LHK No.83 Tahun 2016, Tentang Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) merupakan sistem dalam pengelolaan sumber daya hutan pada hutan negara maupun hutan hak dengan melibatkan masyarakat disekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak Program Perhutanan Sosial Skema Kemitraan Kehutanan terhadap Kelestarian hutan dan pendapatan petani hutan. Program Perhutanan Sosial memberikan dampak yang baik terhadap kelestarian hutan dan pendapatan petani hutan. Pada tahun 2017-2019 tingkat keterlibatan tinggi LMDH dan petani dapat mendukung keberhasilan tanaman dengan nilai 90-97% atau sangat baik pertumbuhannya, untuk penanggulangan gangguan keamanan hutan dan kebakaran, pada tahun 2019, keterlibatan Petani dan LMDH sangat tinggi setahun 6 kali kegiatan, mendukung kecilnya gangguan keamanan hutan yang hanya terjadi 4 kali dengan kerugian hanya Rp.7.012.000, serta dapat menurunkan luasan kebakaran hutan dari 17 Ha menjadi 4 Ha. Pada sektor pendapatan melalui program PS skema kemitraan kehutanan, rata rata pendapatan bersih petani dalam setahun sebesar Rp. 324.950.000 atau 62,5% dari pendapatan total dan Rp. 195.510.000 atau

* Korespondensi email: djokosetyo@unmer-madiun.ac.id

Alamat : Fakultas Pertanian Universitas Merdeka Madiun, I. Serayu No.79, Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur Indonesia 63133

37,5% diperoleh dari sumber pendapatan lain (beternak, berdagang, dan Pekerjaan lain).

Kata kunci: Perhutanan Sosial, Kemitraan, Kelestarian Hutan, Pendapatan.

Abstract: One of the Government's efforts to create a prosperous society, sustainable forests, and maintained food security in Indonesia is the issuance of Minister of Environment and Forestry Regulation No. 83/2016, Concerning Social Forestry. Social Forestry (Social Forestry) is a system in the management of forest resources in state and private forests by involving communities around the forest as the main actors in forest management. This research is conducting to determine the impact of the Forestry Partnership Scheme Social Forestry Program on forest conservation and forest farmer income. The Social Forestry Program has a good impact on forest sustainability and the income of forest farmers. In 2017-2019 the high level of involvement of LMDH and farmers can support the success of crops with a value of 90-97% or tremendous growth, for overcoming forest and fire security disturbances. In 2019, the involvement of Farmers and LMDH was very high in 6 times a year, supporting the small number of forest security disturbances that only occurred four times with a loss of only Rp. 7,012,000, and can reduce the area of forest fires from 17 Ha to 4 Ha. In the income sector, through the PS program of the forestry partnership scheme, the average net income of farmers in a year is Rp. 324,950,000 or 62.5% of the total gain and Rp. 195.510.00 or 37.5% obtained from other sources of income (livestock, trading, and other jobs).

Key words : Social Forestry, Partnership, Forest Conservation, Income

1. Pendahuluan

Sektor Pertanian dan sektor kehutanan merupakan 2 sektor yang memiliki peran penting bagi bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan, dikarenakan Sektor pertanian dan Kehutanan menghasilkan sumber pangan yang besar, hal itu dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran bagi Masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Maka dari itu perlu dilakukan upaya tindakan, kebijakan maupun tindakan yang

mengarah untuk mewujudkan Masyarakat sejahtera dan hutan lestari.

Tingginya ahli fungsi lahan pertanian menjadi Perumahan, industri dan sektor lain dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan. Maka dari itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus hadir dalam menentukan kebijakan terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Kebijakan ini perlu didukung dari semua sektor salah satunya adalah pada pengelolaan hutan yang seimbang supaya dapat mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam mendukung upaya tersebut, dikeluarkanlah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan yaitu Perhutanan Sosial, yang dulu hutan dikelola sepenuhnya oleh Perum Perhutani, dengan kebijakan Perhutanan Sosial, Perum Perhutani diwajibkan harus menggandeng masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dampak program Perhutanan Sosial skema kemitraan Kehutanan terhadap kelestarian hutan dan dampak program Perhutanan Sosial terhadap pendapatan petani hutan yang tergabung di LMDH Rimba Mas Sejahtera.

Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial (*Social Forestry*) merupakan salah satu kebijakan Kementerian Kehutanan pada saat itu, dan saat ini

adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengartikan Perhutanan Sosial sebagai sistem daam pengelolaan sumber daya hutan pada hutan negara maupun hutan hak dengan melibatkan Masyarakat disekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan, dalam mewujudkan Masyarakat sejahtera dan terjaganya kelestarian hutan (Hakim, 2010)

Defenisi Perhutanan Sosial sendiri banyak ditafsirkan oleh berbagai pihak. Di Cina, Perhutanan Sosial diartikan sebagai bentuk dari sistem pengelolaan hutan yang melibatkan berbagai komponen Sosial. Pengertian Sosial dalam hal ini adalah semua pihak yaitu pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya Masyarakat, universitas/lembaga penelitian hingga Masyarakat sendiri. *Social Forestry is a forestry which aims at producing flows of production and recreations benefits for the community*, melihat secara umum bahwa kegiatan kehutanan yang menjaminkelancaran manfaat produksi dan kesenangan bagi Masyarakat, tanpa membedakan apakah itu lahan milik publik (negara) maupun lahan perorangan (*private land*). (Cifor, 2003).

Kebijakan Perhutanan Sosial dan Kebijakanya

Slamet Edi Sumanto,2009 mengatakan, Perhutanan Sosial sebagai salah satu model pemberdayaan yang ditawarkan

Departemen Kehutanan setidaknya merupakan langkah maju dalam mengatasi persoalan konflik pengelolaan hutan antara pihak departemen dengan Masyarakat. Namun bukan berarti bahwa konsep tersebut merupakan obat mujarab yang langsung dapat mereduksi atau menghentikan konflik pengelolaan hutan, sebab persoalan konflik terjadi setelah implementasi program tersebut di lapangan. Adanya perbedaan kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat program, persoalan teknis dan non teknis (administrasi, perijinan, dan lain-lain) di lapangan hingga persoalan hak-hak Masyarakat menjadi sumber konflik baru dalam pengelolaan kawasan hutan. Program pemberdayaan melalui Perhutanan Sosial merupakan salah satu strategi resolusi konflik, tetapi pada beberapa aras dan tujuan terdapat unsur konflik disebabkan antara lain : kebijakan program yang masih bersifat sentralistik, tahapan pemberdayaan yang masih bersifat prosedural, serta penerapan batas/arena aksi, aturan-aturan main dan penetapan stakeholders belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan kerangka program pemberdayaan.

Pelaksanaan Perhutanan Sosial oleh Perum Perhutani dalam skema kemitraan, memberikan harapan terjaganya hutan dari gangguan keamanan hutan berupa ilegal Logging, kebakaran hutan dan kegagalan tanaman. Kemitraan kehutanan dalam PHBM sebagai bentuk kegiatan yang melibatkan Masyarakat

desa hutan untuk ikut dalam mengelola hutan, diharapkan dapat memberikan dampak terjaganya kelestarian hutan dan keamanan hutan dari gangguan keamanan hutan, dengan memberi ruang lahan garapan untuk pertanian pada sela sela tanaman pokok Perhutani, atau pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT), sehingga aktifitas ilegal logging dapat dikurangi (Perum Perhutani KPH Saradan, 2015).

Pelaksanaan perhutanan sosial juga merupakan salah satu upaya meningkatkan produktifitas kawasan hutan ditinjau dari aspek hasil kayu untuk perum perhutani dan hasil non kayu untuk masyarakat di sekitar hutan maupun untuk menjaga kelestarian dan perlindungan alam serta lingkungan hidup (DS Martono, 2020).

Dampak Perhutanan Sosial Secara Ekonomis Masyarakat

Program Perhutanan Sosial merupakan penjabaran program Nawa Cita Presiden Joko Widodo dengan memberikan ruang akses Masyarakat kawasan hutan secara legal formal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dengan tujuan peningkatan kesejahteraan Masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif di Masa yang akan datang (Absori, Sigit Sapto Nugroho2 & Elviandri, 2019).

Program Perhutanan Sosial memiliki dampak yang baik bagi perekonomian Masyarakat terutama setelah mereka menerima Surat keputusan (SK) Hak pengelolaan memberikan nilai tambah bagi aset tanah dan asset batang pohon kehutanan. Selanjutnya dapat menambah pendapatan dengan menanam tanaman komoditas atau memanfaatkan lahan hutan untuk pariwisata. Kemudian dapat berkembang menyerap tenaga kerja semakin banyak. Jika pada paguyuban tani lahan lahan mereka hanya biasanya menjadi sumber penghasilan sampingan mereka akhirnya kini bisa menjadi sumber penghasilan utama mereka, disamping itu dampak yang lebih besar Perhutanan Sosial adalah dapat mengurangi arus urbanisasi,(Prof. Mudrajat Kuncoro, 2019).

2. Bahan dan Metode

Bahan dan obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok LMDH Rimba Mas Sejahtera Desa Pajaran, hutan di Perum Perhutani KPH Saradan yang berlokasi di RPH Pajaran BKPH Pajaran, serta Pegawai Perum Perhutani di kesatuan RPH Pajaran, BKPH Pajaran dan KPH Saradan. Pelaksanaan Penelitian bulan April samapai dengan Juli 2020.

Media tanam menggunakan kombinasi sekam padi dan tanah jenis latosol dengan perbandingan 2:1. Nutrisi menggunakan pupuk AB mix berupa larutan nutrisi stok A terdiri atas unsur N, P,

Metode Penelitian *deskriptif kualitatif*, selain menggunakan data kualitatif, diperlukan pula data kuantitatif, sebagai penunjang untuk memperjelas deskripsi. Yang dilakukan di kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani di RPH Pajaran BKPH Pajaran KPH Saradan dan LMDH Rimba Mas Sejahtera Desa Pajaran Saradan Madiun. Melalui wawancara mendalam terhadap 30 orang responden (5% dari total anggota LMDH yang mengerjakan lahan di RPH Pajaran) yang diambil secara *purposive sampling*, serta pengumpulan data dari Perum Perhutani, Pemerintah Desa dan Petugas dari Perhutani.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Data Sekunder Tentang Kelestarian Hutan

Perhutanan Sosial Skema Kemitraan kehutanan merupakan bentuk kerjasama antara Masyarakat setempat dengan pengelola hutan, dalam melakukan pengelolaan hutan secara bersama-sama. Adapun tujuan besar dalam Perhutanan Sosial adalah untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi Masyarakat setempat, dan Masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau disekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan Masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Pada sektor kelestarian hutan, akan dilihat beberapa faktor yang mendukung nilai keberhasilan fungsi kelestarian hutan antara lain.

Keberhasilan tanaman, keamanan hutan atau kejadian ilegal logging, kebakaran hutan dan bencana alam.

Hasil data pada karakter jumlah cabang dan diameter batang pada Tabel 1 ternyata pengaruh tanah dapat menjadi faktor lain penentu terbentuknya jumlah cabang tanaman tomat cerry, sebab media tanam yang digunakan dalam penanaman tomat cerry dengan irigasi tetes ini berupa kombinasi sekam dan tanah. Sebagaimana diungkapkan (Sutapradja, 2008) jenis tanah latosol Subang dapat berpengaruh terhadap jumlah cabang dibandingkan dengan jenis tanah lain karena memiliki kandungan unsur hara yang relative lebih sedikit.

Data Keberhasilan Tanaman

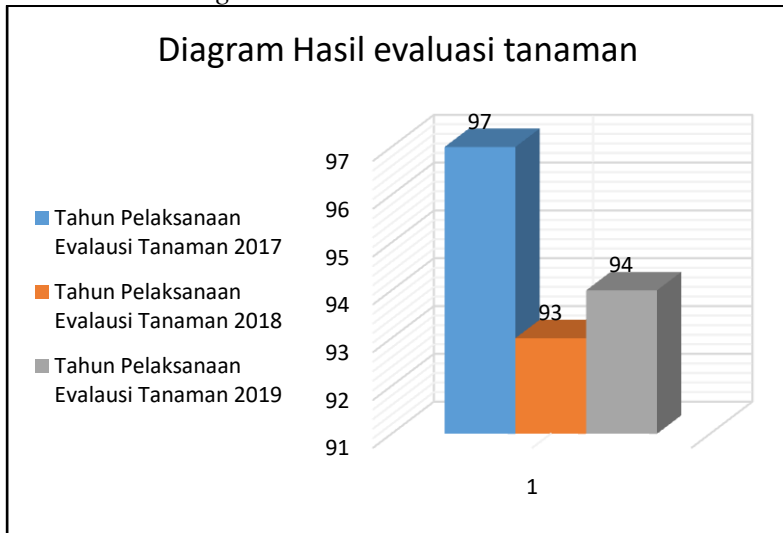
Keberhasilan tanaman merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam menjaga kelestarian hutan, data keberhasilan tanaman ini disajikan dalam periode tahun 2017 sampai tahun 2019, hal ini dikarenakan pelaksanaan program PS dimulai tahun 2017 untuk di LMDH RMS, dan di areal kerja Perum Perhutani. Adapun data keberhasilan tanaman yang disajikan hanya pada lokasi di RPH Pajaran saja sebagai lokasi penelitian, yang diperoleh dari data skunder pelaksanaan monitoring dan evaluasi tanaman oleh Perum Perhutani KPH Saradan.

Tabel. 1. Data Rekap Hasil Evaluasi Tanaman kehutanan

| No | Uraian | Tahun Pelaksanaan Evaluasi Tanaman | | | Ket |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Rata Rata Hasil Evaluasi tanaman | 97 % | 93% | 94% | |

Sumber data: Olah data Evaluasi Tanaman

Diagram.1 Hasil evaluasi tanaman



Sumber Data: Data Hasil Evaluasi Perum Perhutani KPH Saradan

Evaluasi penilaian tanaman kehutanan di Perum Perhutani memakai dasar Surat Direksi Perum Perhutani No.1380/Kpts/Dir/2019, tentang Pedoman Evaluasi Tanaman, dengan penilaian berdasarkan persen tumbuh tanaman.

- Sangat Baik : Jika Persen tumbuh tanaman > 95%
- Baik : Jika Persen tumbuh tanaman 90%-95%
- Cukup : Jika Persen tumbuh tanaman 80 %-89%
- Jelek : Jika Persen tumbuh tanaman < 80%.

Berdasarkan tabel 1, Rata-rata keberhasilan tanaman pada tahun 2017, 2018, 2019, dapat diketahui bahwa keberhasilan tanaman di RPH pajaran pada tahun 2017, sangat baik dengan Persentase tumbuh 97% untuk jenis tanaman Jati Plus Perhutani (JPP), dan pada tahun 2018 persentase tumbuh 93 % dan naik menjadi pada tahun menjadi 94%, hal ini dikarenakan jenis tanaman berbeda, yaitu sonokeling dan rimba campur rata rata hasil penilaiannya 90%-94%. Namun demikian untuk jenis tanaman Jati plus Perhutani (JPP) persentase tumbuh sangat baik pada kisaran 97%, dapat dilihat pada hasil evaluasi tanaman tahun 2017 dan 2018.

Data Gangguan Keamanan hutan

Data gangguan keamanan hutan ini dilakukan untuk mengukur kerusakan hutan dan kerugian bagi Perum Perhutani. Pada penelitian ini akan dilihat gangguan keamanan hutan selama 3 tahun, pada tahun 2017, 2018 dan 2019, data gangguan keamanan hutan ini disajikan hanya pada lokasi penelitian di BKPH Pajaran, dan dapat dilihat pada tabel 2.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa selama 3 tahun terakhir, gangguan keamanan hutan dapat diturunkan. Artinya, selama 3 tahun program PS, dengan melibatkan Petani hutan dan LMDH mempunyai peran untuk menurunkan gangguan keamanan hutan di RPH Pajaran. Hal ini nantinya dapat

disinkronkan dengan aktifitas LMDH dalam menjaga keamanan hutan.

Tabel. 2. Gangguan keamanan hutan.

| No | Lokasi | Tahun | Kejadian | Pohon | Kerugian |
|-------|---------|-------|----------|---------|-------------|
| | | | (Kali) | (Pohon) | (x 1.000) |
| 1 | RPH | 2017 | 20 | 69 | 42.147 |
| | Pajaran | 2018 | 16 | 61 | 125.569 |
| | BKPH | 2019 | 4 | 17 | 7.012 |
| Total | | | 40 | 147 | 174.728 |

Sumber data: Data Kebakaran Hutan, KPH Saradan

Data Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan salah satu indikator yang dapat menyebabkan terganggunya kelestarian hutan, dimana kebakaran hutan dapat menyebabkan kerugian secara materil maupun non materil terhadap kelangusgan hidup vegetasi dan satwa yang ada di kawasan hutan tersebut. Dimana penyebab kejadian kebakaran hutan ini, dapat disebabkan secara alami karena panas tinggi yang meyebabkan seresah daun terbakar, dan oleh ulah manusia yang membakar secara langsung untuk membersihkan lahan atau membuang putung rokok sembarangan. Lebih jelasnya kejadian kebakaran hutan selama 3 tahun pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel.3. Data kebakaran hutan

| No | Lokasi | Tahun | Kejadian (Kali) | Luas (Ha) | Pohon (Buah) | Kerugian (x 1.000) |
|----|--------------|-------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|
| | RPH Pajaran | 2017 | 1 | 17,00 | | 383 |
| | BKPH Pajaran | 2018 | 3 | 17,20 | | 11.342 |
| | | 2019 | 2 | 4,00 | | 2.295 |
| | Total | | 6 | 38,2 | - | 14.020 |

Sumber data: Data Kebakaran Hutan, KPH Saradan

Berdasarkan data tabel.3, dapat diketahui diRPH Pajaran selama 3 tahun terjadi 6 kali kejadian kebakaran dengan luas areal terdampak kebakaran seluas 38,2 ha, dengan kejadian tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 3 kali kejadian dan pada tahun 2019 kejadian menurun menjadi 1 kali dengan keluasan 4 ha. Hal ini dapat dianalisa apakah ada peran LMDH dan petani hutan yang dilakukan untuk penanganan kebakaran hutan.

Hasil Data Primer tentang Pendapatan Petani Hutan

Luas Garapan Petani

Pada tabel 2 memperlihatkan karakter bobot basah tanaman rata-rata nilai 42.80 gr – 78.80 gr dan bobot kering tanaman rata-rata kisaran 12.00 gr – 20.20 gr tidak berbeda nyata namun secara nilai perlakuan P5 (20 ml) pada kedua karakter tersebut memiliki nilai tertinggi yaitu 78.80 gr dan 20.20 gr, sedangkan nilai terendah pada perlakuan P1 (5 ml) dengan rata-rata 42.80 gr dan 12.00 gr. Rata-rata nilai *bobot basah akar* 3.6 gr – 5.4 gr dan rata-

rata *bobot kering akar* pada 0.97–1.41 gr tidak menunjukkan berbeda nyata berdasarkan statistik. Hal ini disebabkan oleh penggunaan ukuran polibag yang kurang sesuai atau terlalu kecil pada saat percobaan dilakukan, sehingga menyebabkan ruang pergerakan akar untuk berkembang menjadi terhambat.

Tabel 4. Luas Garapan Responden Pada Lahan Agroforestry

| No. | Luas Total Garapan (Ha) | Jumlah Petani(Orang) | Persentase(%) |
|-------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | > 0,25 | 5 | 26 |
| 2 | 0,25-0,5 | 15 | 50 |
| 3 | 0,6-1,0 | 7 | 23 |
| 4 | 1,0< | 3 | 1 |
| Total | | 30 | 100 |

Sumber data: Olah data dari Kuisoner,2020

Berdasarkan data tabel 4, di ketahui bahwa luas garapan yang terbanyak dikerjakan oleh Petani hutan adalah 0,25- 0,5 ha,yang dikerjakan oleh 15 orang dengan persentase 50%, dan terendah adalah diatas 1 ha, hal ini dapat menunjukkan bahwa rata rata Petani hutan luas garapannya untuk dikelola dengan *sistem Agroforestry* 0,25 – 0,5 Ha, hal ini dilakukan sebagai bentuk pemerataan lahan garapan kepada Petani lainnya, sedangkan luas garapan diatas 0,5 Ha. Lebih dipengaruhi oleh kemampuan petani dan biaya untuk mengerjakan lahan.

Salah satu solusi dan upaya untuk melakukan keamanan hutan dan menjaga kelestarian hutan,yaitu dengan mengembangkan

tanaman PLDT. Luas garapan PLDT di LMDH Rimba Mas Sejahtera dapat disajikan pada tabel dibawah.

Tabel . 5. Luas Garapan Responden Pada Lahan PLDT Porang

| No | Luas Total Garapan (Ha) | Jumlah Petani (Orang) | Persentase (%) |
|-------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | < 0,25 | 4 | 34,00 |
| 2 | 0,25-0,5 | 7 | 58,00 |
| 3 | 0,5-1,0 | 1 | 8,00 |
| 4 | >1,0 | | |
| Total | | 12 | 100 |

Sumber data: Olah data dari Kuisoner,2020

Berdasarkan Tabel 5, diatas kepemilikan lahan PLDT dari 30 responden yang memiliki lahan PLDT adalah 12 orang atau 40 %, hal ini disebabkan pengelolaan PLDT membutuhkan biaya yang besar, misalkan tanaman Porang dalam 1 ha dibutuhkan biaya sampai 25 Juta, untuk biaya benih, saprodi, tanaman dan pemeliharaan. Sesuai data dari LMDH bahwa luasan tanaman PLDT porang yang dikembangkan LMDH saat ini seluas 250 Ha.

Data Pendapatan Petani dalam Kawasan Hutan

Luasan tanaman petani hutan dapat mempengaruhi terhadap hasil yang akan diperoleh, hasil wawancara dengan Pengurus LMDH Bapak Wisdianto, bahwa dalam 1 tahun petani di LMDH Rimba Mas Sejahtera dapat menghasilkan panen selama 2-3 kali panen, dengan jenis tanaman yang sering ditanam adalah jenis

jagung, kacang-kacangan dan ketela. Lebih jelasnya pendapatan petani berih pada lahan agroforestry dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Pendapatan Petani dalam Lahan Agroforestry

| No. | Pendapatan dari lahan Agroforestry dalam 1 tahun (Rupiah) | Jumlah Petani (Orang) | Persentase (%) |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 500.000-2.500.000 | | - |
| 2 | 2.500.000- 5.000.000 | 20 | 66,67 |
| 3 | 5.000.000-10.000.000 | 6 | 20 |
| 4 | >10.000.000 | 4 | 13,33 |
| Total | | 30 | 100 |

Sumber data: Olah data dari Kuisoner,2020

Berdasarkan Tabel 6, diatas pendapatan petani dilahan agroforestry paling besar adalah antara 2500.000-5.000.000 dengan 66,67 %, hal ini dikarenakan pengaruh dari luasan garapan petani yang rata rata 0,2-0,25 Ha. Dan bagi pemiliki luas garapan yang luas dan hasl yang tinggi dipengaruhi oleh kemampuan untuk permodalan.

Tabel 7. Pendapatan Petani dari Lahan PLDT Tan.Porang

| No. | Pendapatan dari lahan PLDT dalam 1 tahun (Rupiah) | Jumlah Petani (Orang) | Persentase (%) |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 500.000-2.500.000 | | - |
| 2 | 2.500.000- 5.000.000 | | |
| 3 | 5.000.000-10.000.000 | 5 | 41,7% |
| 4 | >10.000.000 | 6 | 58,3% |
| Total | | 11 | 100 |

Sumber data: Olah data Kuisoner dan Wawancara, 2020

Berdasarkan Tabel.7 diatas, diketahui bahwa tidak semua Petani mengembangkan PLDT, hal ini disebabkan oleh kemampuan permodalan, tanaman PLDT yang dikembangkan petani di LMDH Rimba Mas Sejahtera adalah Tanaman porang, dengan hasil per ha adalah 5-8 ton, tergantung masa tanamnya dan pemeliharaan, semakin lama hasil yang didapat juga akan besar. Tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan dari PLDT rata rata adalah diatas Rp. 5.000.000, artinya pospek PLDT *tanaman* Porang sangat menjanjikan, dan lebih besar dari pada hasil dari tanaman Agroforestry.

Data Pendapatan Petani dari Sumber lain

Pendapatan Petani lain berasal dari pekerjaan lain antara lain, perdagangan, sebagai buruh tani, dan beternak. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel 8 dibawah.

Tabel. 8. Rekapitan Pendapatan dari Sumber Lain (berdagang, pekerjaan lain)

| No | Pendapatan lain tahun (Rupiah) | Jumlah Petani(Orang) | Persentase(%) |
|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 500.000-1.500.000 | 4 | 13,33 |
| 2 | 1.500.000-2.500.000 | 10 | 33,33 |
| 3 | 2.500.000-5.000.000 | 9 | 30,00 |
| 4 | >5.00.000 | 7 | 23,34 |
| Total | | 30 | 100 |

Sumber data: olah data Kuisoner dan wawancara

Tabel 9. Pendapatan Bersumber Dari Ternak

| No | Pendapatan dari ternak (Rupiah) | Jumlah Petani(Orang) | Persentase(%) |
|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 500.000-1.500.000 | 6 | 42,86 |
| 2 | 1.500.000-2.500.000 | 1 | 7,14 |
| 3 | 2.500.000-5.000.000 | 3 | 21,43 |
| 4 | >5.00.000 | 4 | 28,57 |
| Total | | 14 | 100 |

Sumber data: olah data Kuisoner dan Wawancara

Berdasarkan tabel 8 dan tabel 9, di ketahui bahwa semua petani masih memperoleh pendapatan lain diluar kegiatannya di lahan hutan, dengan besaran yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh umur, dan kemampuan, serta usaha lain. Hasil wawancara bahwa pendapatan lain lebih banyak berasal dari upah bekerja kepada pihak lain yaitu sebagai buruh tani atau pekerjaan srabutan, dan pendapatan sumber lain terbesar adalah petani yang memiliki usaha perdagangan, biasanya sebagai pengepul tanaman pertanian atau porang.

Kegiatan LMDH dalam Program Perhutanan Sosial

Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial Skema Kemitraan antara LMDH Rimba Mas Sejahtera dengan Perum Perhutani KPH Saradan. Tertuang dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan kehutanan, didalamnya tertuang hak dan kewajiban Para Pihak, masing-masing harus menaati dan menjalankan dalam

Dampak Program Perhutanan Sosial Skema Kemitraan Kehutanan
Terhadap Kelestarian Hutan dan Pendapatan Petani Hutan

pelaksanaan PS. Salah satu kewajiban dan peran serta petani dan LMDH tersajikan dalam kegiatan kegiatan dibawah ini.

Tabel.10. Kegiatan Sosialisasi Proram Perhutanan Sosial

| No | Kegiatan | Jumlah pelaksanaan Kegiatan (kali) | | | Ket |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Sosialisasi Program PS | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Sosialisasi tanaman | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | Sosialisasi Keamanan Hutan dan bencana | 2 | 3 | 4 | |

Sumber data: hasil Kuisioner dan Wawancara

Tabel. 11 Keterlibatan LMDH dan Petani dalam tanaman hutan

| No | Kegiatan | Jumlah pelaksanaan Kegiatan (kali) | | | Ket |
|----|--------------------------|---------------------------------------|------|------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Kegiatan penanaman hutan | 6 | 4 | 3 | |
| 2 | Kegiatan sulaman | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | Kegiatan tanaman swadaya | - | 2 | 4 | |

Sumber data: hasil Kuisioner dan Wawancara

Berdasarkan tabel tabel kegiatan LMDH diatas, bahwa selama 3 tahun ini, tahun 2017, 2018, dan 2019 adanya dukungan petani dan LMDH terhadap kegiatan kehutanan sangat tinggi, dan paling sering dilakukan adalah kegiatan pada tanaman, hal ini dikarenakan ada kewajiban bagi pengelolaa lahan agroforestry harus membantu dalam tanaman hutan dan menjaganya. Disamping itu kegiatan sosialisasi dan keamanan hutan juga sangat penting agar pelaksanaan Program Perhutanan Sosial dapat

berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan membantu dalam keamanan hutan dan kebakaran merupakan salah satu bentuk peran LMDH dalam ikut menjaga kelestarian hutan.

Tabel. 12. Kegiatan Keamanan hutan

| No | Kegiatan | Jumlah pelaksanaan Kegiatan (kali) | | | Ket |
|----|--------------------------------|------------------------------------|------|------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Patroli keamanan hutan bersama | 2 | 4 | 6 | |

Sumber data: hasil Kuisioner dan Wawancara

Tabel. 13. Kegiatan Pencegahan kebakaran hutan

| No | Kegiatan | Jumlah pelaksanaan Kegiatan (kali) | | | Ket |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|------|------|-----|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Pembuatan Sekat bakar | - | 1 | 3 | |
| 2 | Pembuatan papan pengumuman | | | 2 | |
| 3 | Penanganan Kebakaran hutan | 3 | 3 | 5 | |
| Total | | 3 | 4 | 10 | |

Sumber data: hasil Kuisioner dan Wawancara

Tujuan analisa data pendapatan ini adalah untuk mengetahui kontribusi pendapatan LMDH atau Petani hutan dari kegiatan Pengelolaan hutan, dari Pengolahan Agroforestry, PLDT dan Sharing tebangan selama pelaksanaan Program Perhutanan Sosial. Teknis perhitungan pendapatan petani adalah dengan menghitung pendapatan petani rata rata dari kegiatan

agroforestry dan PLDT, ditambah dengan pendapatan dilaur kehutanan, dan selanjutnya ditotal.

Pendapatan total tersebut dipergunakan untuk membagi pendapatan dari kegiatan PS dan Pendapatan lain, supaya dapat diketahui persentasenya. Dan hasilnya perhitungan dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini.

Tabel.14. Analisa Pendapatan Petani

| No | Sumber Pendapatan | Nilai rata-rata Pendapatan petani (Rp) | Persentase (%) | Ket | |
|----|-------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 1 | Pendapatan Agroforestry | 5.565.000 | 32,1 | Kerjasama kehutanan | Kemitraan |
| 2 | Pendapatan PLDT | 5.266.700 | 30,4 | Kerjasama kehutanan | Kemitraan |
| 3 | Pendapatan Lain | 3.960.000 | 22,8 | Bedagang, srabutan | pek |
| 4 | Pendapatan beternak | 2.557.000 | 14,7 | Beternak kambing, sapi | ayam, |
| | Total | 14.791.700 | 100 | | |

Sumber data: Olah data

4. Kesimpulan

Program Perhutanan Sosial Skema Kemitraan kehutanan yang dilakukan oleh LMDH Rimba Mas Sejahtera, memberikan pengaruh terhadap kelestarian hutan. Selama 3 tahun 2017, 2018, dan 2019, dengan penurunan pencurian kayu, kebakaran hutan dan keberhasilan tanaman pokok perhutani.

Program Perhutanan Sosial skema Kemitraan Kehutanan kerjasama antara LMDH Rimba Mas Sejahtera dengan perum Perhutani KPH Saradan, memberikan ruang garapan kepada 602 KK anggota LMDH Rimba Mas Sejahtera, sehingga dapat meningkatkan pendapatan sebesar 62,5%, yang diperoleh dari hasil tanaman agroforestry dan PLDT.

5. Referensi

- Absori, Sigit Sapto Nugroho & Elviandri, 2017, *Legalitas Perhutanan Sosial: Sebuah Harapan Menuju Kemakmuran Masyarakat Kawasan Hutan*, jurnal Yustesia Merdeka Vol 3 No 2 september 2017 page 97 – 106
- Achmad Budiman dan Ris hadi Purwanto, 2014. Peluang Adopsi System Agroforestry dan Kontribusi Ekonomi pada Berbagai Pola Tanam Hutan Rakyat di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 14 No. 1, Pebaruari 2014, 15 - 26
- DS. Martono, R. Setiahadi, S Rahayu, Wuryantoro, AP Atmaja (2020) Estimation Carbon Storage of Community Forest through Timber Legality Assurance System *Jurnal IJASEIT* Vol 10 (2020) no 4 page 1709-1715 DOI:10.18517/ijaseit.10.4.4098
- Hakim, Ismatul. dkk. 2010. *Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Bogor. Pusat

Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
1 – 141 hal.

- Imam Suyudono, Lailan Syaufina, Didik Suharjito, 2014. Analisis Pola Kemitraan Agroforestry Dalam Rangka Mengurangi Ancaman Perambahan Hutan (Studi Kasus Tumpangsari Tanaman Pangan Di IUPHHK-HT Pulau Laut Kota Baru Kalimantan Selatan), *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 4 No. 1 (Juli 2014): 1 – 8.
- Irawan, 2010. Evaluasi Program Perhutanan Sosial Tumpangsari Ditinjau Dari Pendapatan Peserta Program Dan Keberhasilan Tanaman (Studi Kasus di RPH Sukaraja dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Giri Mukti. Institut Pertanian Bogor
- Kurniawan Andri, 2011, Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan KPH Telawa (Studi Kasus di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari dan Yosowono) Skripsi S1 Tidak dipublikasikan Universitas Negeri Malang.
- Perum Perhutani KPH saradan, 2015. *Laporan Studi Dampak Sosial (SDS) tahun 2015*.
- Rian Setiawan, Indra Gumay Febryano, Afif Bintoro, 2018. Partisipasi Masyarakat pada Pengembangan Agroforestri dalam Program Kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani. *Jurnal Sylva Lestari* Vol. 6 No. 3, September 2018 (56-63).

Slamet Edi Sumanto, 2009. *Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik (Social Forestry Development Policy In Conflict Resolution Perspective)*, Balai Penelitian Kehutanan Kupang.

Ulfa Nur Kholifah, Christine Wulandari, Trio Santoso dan Hari Kaskoyo, 2017. Kontribusi Agroforestry Terhadap Pendapatan Petani Di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari* Vol. 5 No.3, Juli 2017 (39—47).